

ANALISIS PENGARUH PERILAKU ORGANISASI TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember)

Anis Irma Masyitoh*¹
Nur Hisamuddin²
Imam Mas'ud³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Indonesia

*e-mail: anisirmamasyitoh@gmail.com¹, hi5am@yahoo.com², mas.imam@unej.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pelatihan yang diukur dengan materi pelatihan, metode pelatihan, sikap dan keterampilan pelatih dan fasilitas pelatihan. Kejelasan tujuan diukur dengan transparansi sasaran, perencanaan, target, pengawasan dan sanksi. Dukungan atasan diukur dengan partisipasi atasan, motivator, dan reward. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah yang diukur dengan validity, reliability, efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Data penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Metode penentuan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh sampel berjumlah 38 orang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, uji kelayakan model, dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan alat statistik yaitu SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan tujuan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, dan dukungan atasan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Kata kunci: Pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, sistem akuntansi keuangan daerah

Abstract

This research is a quantitative study aimed at examining the influence of training, clarity of objectives, and supervisor support on the implementation of the local financial accounting system in the Financial and Asset Management Agency of Jember Regency. The independent variables in this study include training measured by training materials, training methods, trainer attitudes and skills, and training facilities. Clarity of objectives is measured by transparency of goals, planning, targets, monitoring, and sanctions. Supervisor support is measured by supervisor participation, motivators, and rewards. The dependent variable in this study is the local financial accounting system measured by validity, reliability, efficiency, and effectiveness. The purpose of this research is to determine the influence of training, clarity of objectives, and supervisor support on the implementation of the local financial accounting system. The research data are primary data obtained directly from the respondents. The population in this study is all employees of the Financial and Asset Management Agency of Jember Regency. The sample determination method uses purposive sampling, and a sample of 38 people is obtained. The analysis methods used in this study include descriptive statistics, classical assumption tests, determination coefficient, model feasibility test, and multiple linear regression analysis using the SPSS 25 statistical tool. The results of the study show that training has an influence on the implementation of the local financial accounting system, clarity of objectives has an influence on the implementation of the local financial accounting system, and supervisor support has an influence on the implementation of the local financial accounting system.

Keywords: Training, clarity of objectives, supervisor support, local financial accounting system.

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya sendiri. Pemerintah daerah berkewajiban membuat laporan keuangan yang menjadi wujud pertanggung jawaban dan juga sebagai penilaian kinerja atas dana yang telah diselenggarakan. Pemerintah daerah memerlukan adanya suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam mengelola keuangannya, sistem tersebut yaitu sistem yang dapat mengolah data-data dan menghasilkan informasi secara jelas dan terstruktur. Pemerintah mengembangkan sistem informasi keuangan yang memiliki keunggulan berupa fitur yang handal dari sisi kelengkapan fungsionalitas dan memiliki integrasi yang tinggi dengan sistem-sistem lain yang saling berkaitan. Maka dari itu, dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan pada bidang keuangan terutama pada instansi pemerintah daerah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat manajemen keuangan yaitu berupa sistem informasi yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang memadai sangat diperlukan untuk memperoleh kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Wulandari dan Yuliati, 2023).

Tabel 1. Perkembangan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Jember 2018-2022

No.	LKPD (Tahun)	Kualitas Laporan Keuangan
1.	2018	BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPD. Sembilan kelemahan itu adalah: Penatausahaan aset tetap belum tertib, pengakuan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) tidak tepat, penyajian saldo aset tidak berwujud dan aset lain-lain belum memadai, pemanfaatan aset tanah tanpa pengenaan sewa, realisasi belanja daerah atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan gratis (PPG) tidak dilakukan secara memadai.
2.	2019	Dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK RI menilai ada penganggaran dan realisasi belanja di 13 OPD (organisasi perangkat daerah) sebesar Rp 70 miliar lebih yang dianggap tidak tepat dan melanggar ketentuan perundangan. Ke-13 OPD tersebut, yakni belanja pegawai di Bagian Bina Mental, Bagian Humas, Dinas PU Bina Marga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Dispora, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Cipta Karya, dan Satpol PP. LHP BPK disampaikan secara virtual, sehingga tidak ada penjelasan rinci. Misalnya, ada temuan di kas bendahara bos, tapi tidak dijelaskan secara detail.

3.	2020	Terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp. 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai, manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp. 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan.
4.	2021	Bupati menegaskan bahwa masih ada persoalan yang belum selesai. Salah satunya, terkait dengan anggaran pengadaan wastafel Covid-19 yang mencapai Rp. 107 miliar dan saat ini masih menggantung, Penatausahaan dan pencatatan aset tetap dinilai belum memadai, kekurangan volume dan mutu pekerjaan belanja modal, serta realisasi belanja tak terduga TA 2020 belum diakui bukti pertanggungjawabannya.
5.	2022	Bupati menegaskan bahwa masih ada temuan yang perlu untuk ditindak lanjuti yaitu: adanya pengelolaan dan pencatatan aset yang belum sistematis, adanya kelebihan belanja honorarium sebesar Rp. 153 juta, dan adanya pembayaran atas realisasi belanja modal yang berlebihan

Sumber: BPK Jatim, 2023

Berdasarkan tabel 1. di atas, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dinilai masih kurang. Hal tersebut dapat kita lihat pada data Perkembangan Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Jember selama lima tahun, dari tahun 2018-2022. Oleh sebab itu, berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada di Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember selama lima tahun dari tahun 2018-2022, terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember secara umum menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Jember masih perlu ditingkatkan lagi.

Pengimplementasian sistem informasi pemerintah daerah sebagai sistem akuntansi keuangan daerah di instansi pemerintah daerah adalah bagian wujud pendayagunaan teknologi informasi yang berfungsi sebagai alat manajemen keuangan yang terkomputerisasi bagi pemerintah daerah yang dapat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Wulandari dan Yuliati, 2023). Menurut PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Pemerintah diwajibkan mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mengelola keuangannya serta mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya untuk mewujudkan terselenggaranya proses pembangunan yang maju dan lebih baik.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menginovasikan sebuah sistem aplikasi komputer yang bisa mengelola data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan setiap waktu, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (Karmana dkk, 2022). SIMDA merupakan sistem manajemen informasi pemerintah daerah yang berupa subsistem dari Sistem Informasi Manajemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) yang mendukung kebutuhan informasi untuk pelaksanaan fungsi utama serta penunjang bagi pemerintah daerah yang integrasinya baik (Yanto & Akfir, 2020). Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember adalah salah satu pemerintah daerah yang menggunakan SIMDA dalam mengelola keuangannya dari tahun 2015, namun setelah dikeluarkannya Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang mengharuskan pemerintah daerah memakai SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam tata kelola keuangan serta pembangunan, maka pengelolaan keuangan BPKAD Jember juga berganti menggunakan SIPD sejak tahun 2021.

Peralihan dari SIMDA ke SIPD yang ada di BPKAD Jember tidak dapat berjalan secara optimal, hal itu terjadi karena SIPD yang terbilang masih baru mengakibatkan para karyawan yang ada di BPKAD perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem SIPD tersebut. Adanya fenomena tersebut maka dapat kita lihat bahwa yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember tidak hanya dipengaruhi oleh pengembangan dan pendayagunaan pada sistem itu sendiri, melainkan juga ditentukan oleh sikap dari pengguna sistem. Menurut Ridwan dkk (2019) faktor utama yang bisa memberi pengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem akuntansi yaitu faktor perilaku organisasi yang terdiri dari keikutsertaan pengguna, dukungan pimpinan, pelatihan, ukuran organisasi serta kejelasan sasaran.

Suwigyo (2019) menyebutkan bahwa faktor organisasi dalam pengimplementasian sistem ada tiga aspek, meliputi pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan. Pelatihan dapat mendukung keberhasilan implementasi SAKD karena dengan pelatihan, bisa mempermudah pemakai pada proses perencanaan sistem tersebut, sehingga dapat menyebabkan peningkatan penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah dan memiliki dampak positif pada kinerja organisasi. Kejelasan tujuan diartikan sebagai sebuah organisasi yang sukses dapat diamati dengan mudah berdasarkan seberapa jauh organisasi itu bisa mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Daft, 2008). Dukungan atasan adalah wujud dukungan dari seorang pimpinan terhadap karyawannya sebagai pengguna sistem informasi akuntansi (Handayani, 2022).

Penelitian mengenai pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan telah masif dilaksanakan, akan tetapi menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian Suwigyo, (2019) memberikan hasil bahwa pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan berpengaruh positif pada implementasi SAKD. Studi yang dilaksanakan oleh Agustina (2019) memperlihatkan hanya faktor kejelasan tujuan yang memiliki pengaruh positif pada implementasi SAKD, sedangkan pelatihan serta dukungan atasan tidak berpengaruh pada implementasi SAKD. Mengingat SAKD memiliki peran penting bagi pemerintah daerah dan karena terdapat hasil yang tidak konsisten dalam penelitian sebelumnya, maka penulis termotivasi meneliti dan menguji kembali seberapa jauh pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan dapat mempengaruhi efektivitas SAKD pada BPKAD Kabupaten Jember.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu:

1. Apakah pelatihan memiliki pengaruh terhadap implementasi SAKD?
2. Apakah kejelasan tujuan memiliki pengaruh terhadap implementasi SAKD?
3. Apakah dukungan atasan memiliki pengaruh terhadap implementasi SAKD?

LANDASAN TEORI

New Public Management

Sebuah sistem manajemen yang terpusat dengan perangkat manajemen baru seperti *benchmarking*, *controlling*, dan *lean management* disebut dengan *new public management* (Denhardt & Denhardt, 2007). *New Public Management* (NPM) memiliki fokus pada manajemen sektor publik yang orientasinya fokus pada kinerja dan mendedikasikan perubahan yang cukup tajam dari sistem manajemen tradisional yang memiliki kesan birokratis, hierarkis, dan kaku berubah menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mendukung pasar (Mardiasmo, 2009).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tentunya membutuhkan suatu sistem akuntansi agar pengelolaan keuangannya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Menurut Halim & Kusufi (2012) sistem akuntansi keuangan daerah merupakan proses identifikasi, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan ekonomi. Indikator yang dipakai dalam pengukuran implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yaitu:

- a. *Validity*, informasi yang terdapat pada sistem akuntansi harus mempunyai tingkat ketepatan tinggi.
- b. *Reliability*, informasi yang terdapat dalam sistem informasi harus bisa dipercaya.
- c. *Efisien*, informasi yang terdapat dalam sistem akuntansi haruslah bisa menghemat biaya.
- d. *Efektif*, informasi yang terdapat dalam sistem akuntansi haruslah menggunakan waktu sebaik mungkin.

Pelatihan

Menurut Manasikana (2019) pelatihan adalah suatu faktor yang dapat menyebabkan pengembangan pengetahuan sumber daya manusia. Pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas para karyawan. Para karyawan perlu untuk melaksanakan pelatihan karena dengan adanya pelatihan maka sumber daya yang dimiliki perusahaan atau organisasi akan mendapatkan nilai tambah serta lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya, oleh sebab itu pelatihan sangatlah dibutuhkan. Indikator yang dipakai dalam pengukuran pelatihan yaitu:

- a. Materi pelatihan atau isi pelatihan yaitu sesuai dan sejalan dengan keperluan pelatihan.
- b. Metode pelatihan yang digunakan relevan dengan subjek serta telah relevan dengan gaya peserta dalam belajar.
- c. Sikap serta keterampilan pelatih, yaitu pelatih harus mempunyai sikap serta keterampilan penyampaian yang dapat mendukung peserta untuk belajar
- d. Fasilitas pelatihan, apakah lokasi pelatihan bisa dikelola instruktur, sesuai dengan bentuk pelatihan, dan jamuan yang memuaskan.

Kejelasan Tujuan

Secara sederhana dalam kaitannya dengan sistem akuntansi keuangan daerah kejelasan tujuan dapat dijabarkan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan pengaplikasian sistem akuntansi keuangan daerah di seluruh level organisasi. Kejelasan tujuan digunakannya suatu sistem dapat memberikan keluasan dan meningkatkan kegunaan sistem (Suwignyo, 2019). Kejelasan tujuan bisa diukur dengan beberapa indikator yaitu:

- a. Transparansi sasaran merupakan suatu keterusan terangan pada perusahaan atau organisasi kepada tiap anggotanya mengenai adanya suatu target yang perlu digapai.
- b. Perencanaan, yaitu berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh para karyawan suatu perusahaan dalam menggapai target.
- c. Target adalah standar sasaran yang diberikan kepada tiap anggota organisasi.
- d. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan yang dilaksanakan manajemen pada anggota dalam meraih tujuan.
- e. Sanksi adalah hukuman yang diterima oleh karyawan yang bekerja tidak sejalan dengan standar maupun prosedur yang disyaratkan perusahaan.

Dukungan Atasan

Dukungan atasan adalah wujud dukungan dari seorang manajer pada karyawannya sebagai pengguna sistem informasi akuntansi. Dukungan atasan sangatlah penting karena dapat berdampak dalam menyokong keberhasilan penerapan sistem baru dan memperluas kapabilitas inovatif bawahannya (Handayani, 2022). Dukungan atasan dapat diukur dengan menggunakan indikator:

- a. Partisipasi atasan dalam bekerja, adalah tindakan nyata dari atasan yang ikut bekerja bersama-sama anggota organisasi lainnya.
- b. Motivator, sebagai seorang motivator pimpinan mendukung karyawannya guna bisa meraih target atau sasaran yang sudah jadi kesepakatan organisasi.

- c. Penghargaan yang diterima karyawan saat bisa meraih target atau sasaran yang dirancang disebut dengan istilah *reward*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dijelaskan dengan bentuk angka dan dianalisa menggunakan teknik statistik (Sangadji & Sopiah, 2018). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan pengolahan data yang diperoleh memakai perhitungan statistik atau aplikasi statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi atas obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tersendiri yang ditentukan oleh penulis untuk dianalisis lalu dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2014). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh pegawai BPKAD Kabupaten Jember. Sampel merupakan bagian dari populasi, sampel pada penelitian ini ditentukan dengan memakai teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang dipakai pada penelitian ini yaitu kepala bidang BPKAD dan seluruh pegawai BPKAD yang berkaitan dengan masalah keuangan dan telah bekerja lebih dari satu tahun.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Adapun implementasi dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik.

2. Variabel Independen

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pelatiha, kejelasan tujuan dan dukungan atasan.

Tabel 2. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pelatihan	Pelatihan merupakan suatu sistem yang terstruktur yang dapat merubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2006)	Handayani (2022) 1. Materi pelatihan 2. Metode pelatihan 3. Sikap dan keterampilan pelatih 4. Fasilitas pelatihan	Skala likert
Kejelasan Tujuan	Kejelasan tujuan didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berhasil dapat dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Daft, 2008)	Handayani (2022) 1. Transparansi sasaran 2. Perencanaan 3. Target 4. Pengawasan 5. Sanksi	Skala likert
Dukungan Atasan	Dukungan atasan merupakan bentuk dukungan dari seorang manajer terhadap karyawannya sebagai pemakai sistem informasi akuntansi (Handayan, 2022)	(Agustina dkk, 2019) 1. Partisipasi Atasan 2. Motivator 3. Reward	Skala likert

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri atas seperangkat kebijakan standar prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, handal dan tepat waktu guna menghasilkan laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Tanjung, 2008)	Zakaria (2022) 1. <i>Validity</i> 2. <i>Reliability</i> 3. Efisien 4. Efektif	Skala likert
---	---	---	--------------

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data primer. Sugiyono (2014) berpandangan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Metode yang dipakai guna memperoleh data primer adalah metode survei yaitu sumber data didapatkan penulis secara langsung dengan menyebarkan kuesioner (angket) pada obyek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu memakai kuesioner. Penulis menyebarkan daftar pertanyaan berupa angket kepada responden. Jawaban yang digunakan dalam mengisi daftar pertanyaan tersebut yaitu dengan memakai skala likert dengan skor 1 – 5. Skala likert merupakan skala yang menggunakan sikap, pendapat dan persepsi orang mengenai fenomena sosial. Jawaban dari setiap instrumen yang memakai skala likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2014). Penilaian kuesioner yang ada dalam penelitian ini yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Netral (N) diberi skor 3, Setuju (S) diberi skor 4, dan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5.

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pelatihan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pelatihan bisa diartikan sebagai didikan jangka pendek yang memakai cara serta prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu (Dahniar dkk, 2019). Pelatihan terkait inovasi sistem diberikan agar pengguna dapat lebih memahami dan menguasai dalam mengimplementasikan sistem tersebut, selain itu pelatihan juga diberikan untuk meningkatkan kinerja karyawan agar bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai tujuan (Shields & Young, 1989).

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Mandalasari dkk (2019) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Subang memperlihatkan pelatihan berpengaruh pada penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal tersebut senada dengan penelitian Suwignyo (2019) pada Pemerintah Kabupaten Lebak yang memberikan hasil bahwa pelatihan berpengaruh pada penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H1: Pelatihan berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah

2. Pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Kejelasan tujuan dalam suatu organisasi bisa menunjukkan sebuah kesuksesan dari pengimplementasian suatu sistem, karena pengguna dengan sebuah kejelasan tujuan akan dapat memahami dalam mengoperasikan sistem tersebut (Robbins & Judge, 2008).

Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Handoko (2001) kejelasan tujuan menunjukkan transparansi dari suatu organisasi yang memperlihatkan alur yang harus dicapai oleh seluruh anggota organisasi dalam bekerja.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan Dewi dkk (2020) pada SKPD Bandung didapatkan hasil kejelasan tujuan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan studi Ningtias dan Mujilan (2020) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Madiun dimana hasil memperlihatkan kejelasan tujuan memiliki pengaruh positif serta signifikan pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H2: Kejelasan Tujuan berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah

3. Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dukungan atasan adalah pandangan karyawan pada atasannya serta sebaik apa atasan memiliki kepedulian pada kesejahteraan dan kepentingan karyawan yang akan memberi pengaruh pada hasil kerja karyawannya (Suwigyo, 2019). Dukungan atasan dalam sebuah inovasi amat krusial karena menunjukkan adanya kedaulatan manajer terkait dengan sumber daya yang ada pada suatu organisasi (Mandalasari dkk, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dkk (2021) pada BKD dan BAPPEDA di Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa kejelasan tujuan memiliki pengaruh pada kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan studi yang dilaksanakan Safitri (2022) pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

H3: Dukungan atasan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Tabel 3. Hasil penyebaran kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar sesuai dengan kriteria	50	100%
Kuesioner yang tidak kembali	12	24%
Kuesioner yang bisa diolah	38	76%

Sumber: Data diolah, 2023

Didasarkan dari data pada Tabel 3. bisa diamati bahwa total penyebaran kuesioner yang memenuhi kriteria pada penelitian ini yaitu sebanyak 50 (100%) kuesioner. Dari total 50 kuesioner ada 12 (24%) kuesioner yang tidak kembali, maka jumlah kuesioner yang dapat diolah yaitu sebanyak 38 (76%).

Statistik Deskriptif

Variabel yang dipakai pada penelitian ini yaitu pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan, dan sistem akuntansi keuangan daerah. Tabel 4. merupakan sajian dari hasil statistik deskriptif dari setiap variabel yang dipakai pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
X1	38	35	60	55,08	5,514
X2	38	30	41	35,08	3,088
X3	38	46	60	56,82	3,631
Y	38	40	60	55,95	4,591

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 4. diperoleh penjelasan terkait variabel pelatihan di mana variabel pelatihan memiliki skor minimum sebesar 35, skor maksimum sebesar 60. Standar deviasi pelatihan

sebesar 5,514 menunjukkan bahwa selisih antara total nilai dari pelatihan dengan nilai rata-ratanya adalah sebesar 5,514. Adapun nilai rata-ratanya adalah sebesar 55,08, di mana lebih tinggi dari nilai minimum yang ditetapkan sebesar 35.

Variabel kejelasan tujuan mempunyai skor minimum sebanyak 30 dan skor maksimum sebesar 41. Standar deviasi kejelasan tujuan sebesar 3,088 menunjukkan bahwa selisih antara total nilai dari kejelasan tujuan dengan nilai rata-ratanya adalah sebesar 3,088. Adapun nilai rata-ratanya adalah sebesar 35,08, di mana lebih tinggi dari nilai minimum yang ditentukan yaitu sebesar 34.

Variabel dukungan atasan memiliki skor minimum sebesar 46, skor maksimum sebesar 60. Standar deviasi dukungan atasan sebesar 3,361 menunjukkan bahwa selisih antara total nilai dari dukungan atasan dengan nilai rerata sebesar 3,361. Adapun nilai rerata sebesar 56,82, di mana lebih tinggi dari nilai minimum yang ditetapkan sebesar 46.

Variabel sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai skor minimum sebesar 40, skor maksimum sebesar 60. Standar deviasi dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu 4,591 menunjukkan bahwa selisih antara total nilai sistem akuntansi keuangan daerah dengan nilai rata-ratanya adalah sebesar 4,591. Adapun nilai rata-ratanya adalah sebesar 55,95, di mana lebih tinggi dari nilai minimum yang ditetapkan sebesar 40.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini dianalisis dengan *df* (*degree of freedom*) dengan rumus $df=n - 2$. Jadi *df* yang digunakan adalah $df = 38 - 2 = 36$ dengan α (*alpha*) 5% (0,05), maka menghasilkan r_{tabel} =sebesar 0,320. Uji validitas dapat dikategorikan valid jika:

1. Mempunyai tingkat signifikan atau $sig < 0,05$
2. Nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} yaitu 0,320

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan (X1)

Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Signifikansi	Keterangan
X1.1	0,540	0,320	0,000	Valid
X1.2	0,752	0,320	0,000	Valid
X1.3	0,791	0,320	0,000	Valid
X1.4	0,796	0,320	0,000	Valid
X1.5	0,852	0,320	0,000	Valid
X1.6	0,832	0,320	0,000	Valid
X1.7	0,723	0,320	0,000	Valid
X1.8	0,931	0,320	0,000	Valid
X1.9	0,826	0,320	0,000	Valid
X1.10	0,825	0,320	0,000	Valid
X1.11	0,846	0,320	0,000	Valid
X1.12	0,793	0,320	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output SPSS di atas dapat dinyatakan bahwa semua indikator variabel pelatihan (X1) yang terdiri atas 12 pernyataan menunjukkan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ serta nilai signifikannya $< 0,05$. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tiap item pernyataan mengenai pelatihan itu valid.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Tujuan (X2)

Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Signifikansi	Keterangan
X2.1	0,509	0,320	0,001	Valid
X2.2	0,558	0,320	0,000	Valid
X2.3	0,595	0,320	0,000	Valid

X2.4	0,615	0,320	0,000	Valid
X2.5	0,526	0,320	0,001	Valid
X2.6	0,701	0,320	0,000	Valid
X2.7	0,591	0,320	0,000	Valid
X2.8	0,626	0,320	0,000	Valid
X2.9	0,493	0,320	0,002	Valid
X2.10	0,420	0,320	0,001	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output SPSS Tabel 6. bisa dinyatakan bahwa seluruh indikator variabel kejelasan tujuan (X2) yang terdiri dari 10 pernyataan menunjukkan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ serta nilai signifikannya $< 0,05$. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tiap item pernyataan mengenai kejelasan tujuan itu valid.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Dukungan Atasan (X3)

Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Signifikansi	Keterangan
X3.1	0,611	0,320	0,000	Valid
X3.2	0,683	0,320	0,000	Valid
X3.3	0,809	0,320	0,000	Valid
X3.4	0,576	0,320	0,000	Valid
X3.5	0,644	0,320	0,000	Valid
X3.6	0,502	0,320	0,001	Valid
X3.7	0,745	0,320	0,000	Valid
X3.8	0,645	0,320	0,000	Valid
X3.9	0,720	0,320	0,000	Valid
X3.10	0,683	0,320	0,000	Valid
X3.11	0,784	0,320	0,000	Valid
X3.12	0,640	0,320	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output SPSS Tabel 7. bisa dinyatakan bahwa semua indikator variabel dukungan atasan (X3) yang terdiri dari 12 pernyataan menunjukkan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ serta nilai signifikannya $< 0,05$. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tiap item pernyataan mengenai dukungan atasan itu valid.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)

Item Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Signifikansi	Keterangan
Y.1	0,683	0,320	0,000	Valid
Y.2	0,553	0,320	0,000	Valid
Y.3	0,733	0,320	0,000	Valid
Y.4	0,742	0,320	0,000	Valid
Y.5	0,748	0,320	0,000	Valid
Y.6	0,662	0,320	0,000	Valid
Y.7	0,781	0,320	0,000	Valid
Y.8	0,808	0,320	0,000	Valid
Y.9	0,648	0,320	0,000	Valid
Y.10	0,808	0,320	0,000	Valid
Y.11	0,706	0,320	0,000	Valid
Y.12	0,732	0,320	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output SPSS Tabel 8. dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X3) yang terdiri atas 12 pernyataan menunjukkan hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$ serta nilai signifikansinya $< 0,05$. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tiap item pernyataan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah itu valid

Uji Reliabilitas

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Varibel	Cronbach's Alpha	Cut of Value	Keterangan
Pelatihan (X1)	0,944	0,60	Reliabel
Kejelasan Tujuan (X2)	0,727	0,60	Reliabel
Dukungan Atasan (X3)	0,888	0,60	Reliabel
SAKD (Y)	0,913	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2023

Berlandaskan hasil pengujian diatas, dapat dipahami bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* >0,60, sehingga bisa dibuat kesimpulan bahwa semua variabel pada penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 10. Uji Normalitas

Variabel Penelitian	Nilai Kolmogorov-Smirnov	Keterangan
Unstandardized Residual	0,200	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, 2023

Dari data **Tabel 10.** hasil uji normalitas menggambarkan bahwa nilai *Asymp Sig* sebesar 0,200 > 0,05, sehingga bisa ditarik kesimpulan pada model regresi ini data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearritas

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel penelitian	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pelatihan (X1)	0,515	1,940	Tidak terjadi multikolinearitas
Kejelasan Tujuan (X2)	0,940	1,064	Tidak terjadi multikolinearitas
Dukungan Atasan (X3)	0,537	1,862	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Lampiran 5

Dari data pada Tabel 10. ketiga variabel independen yaitu pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan menunjukkan hasil nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi indikasi multikolinearitas pada penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 12. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Varibel	Unstandardized Residual Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pelatihan (X1)	0.524	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Kejelasan Tujuan (X2)	0.558	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Dukungan Atasan (X3)	0.823	Tidak terdapat heteroskedastisitas

Sumber: Sumber: Data diolah, 2023

Dari uji *Spearman Rho* pada Tabel 12. didapatkan hasil nilai Sig (2-tailed) 0,524 > 0,05 untuk variabel pelatihan, nilai Sig. (2-tailed) 0,558 > 0,05 untuk variabel kejelasan tujuan, dan nilai Sig. (2-tailed) 0,823 > 0,05 untuk variabel dukungan atasan. Dari hasil itu bisa diamati nilai Sig. (2-tailed) dari tiap variabel > 0,05, sehingga bisa dibuat kesimpulan bahwa data bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Varibel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstanta	-4.636	-	-
Pelatihan (X1)	0,405	0,000	Signifikan
Kejelasan Tujuan (X2)	0,307	0,026	Signifikan
Dukungan Atasan (X3)	0,484	0,002	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 12. bisa diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -4,636 + 0,405 X_1 + 0,307 X_2 + 0,484 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda itu bisa diterangkan sebagai berikut:

1. Konstanta pada persamaan regresi tersebut ialah -4,636. Berarti apabila Kompetensi Pelatihan (X1), Kejelasan Tujuan (X2), Dukungan Atasan (X3) memiliki nilai 0, maka Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) sebesar -4,636.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pelatihan (X1) sebesar 0,405. Berarti apabila variabel Pelatihan (X1) meningkat, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,405.
3. Nilai koefisien regresi variabel Kejelasan Tujuan (X2) sebesar 0,307. Berarti apabila variabel Kejelasan Tujuan (X2) meningkat, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) lantas meningkat sebesar 0,307.
4. Nilai koefisien regresi variabel Dukungan Atasan (X3) sebesar 0,484. Berarti apabila, variabel Dukungan Atasan (X3) meningkat, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y) lantas meningkat sebesar 0,484.

Uji F

Uji F dilaksanakan guna menguji kelayakan suatu model regresi yang telah terbentuk pada tingkat signifikan sebesar 5% (0,05). Kriteria pengujian dilaksanakan untuk membandingkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikan < 0,05. Cara untuk menentukan F_{tabel} adalah dengan melihat distribusi F yang diperoleh dengan perhitungan $F_{tabel} = F(k - 1 ; n - k) = F(3 - 1 ; 38 - 3) = F(2 ; 35) = 3,27$. Hasil uji F pada penelitian disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Uji F

Model	F_{hitung}	F_{tabel}	Sig. F
Regression (Model 1)	33.915	3,27	0,00

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 14. bisa dilihat bahwa nilai F_{hitung} sebesar 33,915 dan nilai F_{tabel} sebesar 3,27 atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ serta nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H_a diterima. Bisa disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini telah layak dipakai untuk mengukur implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Uji t Parsial

Uji t adalah uji yang dilaksanakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t bisa dilaksanakan menggunakan perbandingan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$

serta tingkat signifikansi $< 0,05$. Cara untuk memperoleh t_{tabel} yaitu dengan melihat *degree of freedom* (df) yang didapatkan memakai perhitungan sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = t(a/2; n - k - 1) = t(0,025; 38 - 3 - 1) = 2,032$$

Tabel 15. Hasil Uji t

Variabel	T _{tabel}	T _{hitung}	Sig.	Keterangan
Pelatihan (X1)	2,032	4,068	0,000	H ₁ diterima
Kejelasan Tujuan (X2)	2,032	2,335	0,026	H ₂ diterima
Dukungan Atasan (X3)	2,032	3,267	0,002	H ₃ diterima

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pengujian diatas bisa ditarik kesimpulan:

1. Pengaruh Pelatihan (X1) terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)
Berdasarkan tabel 15. dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} 4,068 > t_{\text{tabel}} 2,032$ dan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya pelatihan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H₁ diterima).
2. Pengaruh Kejelasan Tujuan (X2) terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)
Berdasarkan tabel 15. dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} 2,335 > t_{\text{tabel}} 2,032$ dan dengan nilai signifikansi $0,026 < 0,05$. Artinya kejelasan tujuan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H₂ diterima).
3. Pengaruh Dukungan Atasan (X3) terhadap implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Y)
Berdasarkan tabel 15. dapat dilihat bahwa $t_{\text{hitung}} 3,267 > t_{\text{tabel}} 2,032$ dan dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Artinya dukungan atasan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka terbukti kebenarannya (H₃ diterima).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Besarnya nilai koefisien determinasi menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel independen meliputi pelatihan, kejelasan tujuan, serta dukungan atasan terhadap nilai variabel dependen berupa sistem akuntansi keuangan daerah. Nilai koefisien yang mendekati 1 menandakan bahwa semakin kuat pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai koefisien mendekati 0 menunjukkan semakin kecil pengaruh variabel independen pada variabel dependen. Hasil uji R² dalam penelitian disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Uji R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Estimasi Standar Error
1	0,866	0,750	0,727	2,397

Sumber: Data diolah, 2023

Dari Tabel 16. didapatkan nilai *Adjusted R Square* 0,72, memiliki arti pelatihan, kejelasan tujuan, serta dukungan atasan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 72% sedangkan sisanya yaitu sebesar 28% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pelatihan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil uji t pada hipotesis pertama (H₁) bisa diamati pada Tabel 15. bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), hasil uji t memperlihatkan bahwa t_{tabel} sebesar 2,032 dan t_{hitung} sebesar 4,068 dengan nilai signifikan 0,000,

karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), berarti semakin rutin pelaksanaan pelatihan implementasi sistem akuntansi keuangan yang diadakan di BPKAD Jember maka semakin berkembang juga kemampuan para pengguna dalam mengoperasikan sistem tersebut. Pelatihan berpengaruh positif karena tujuan dari pelatihan pengimplementasian SAKD itu sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi, efektivitas dan meningkatkan kemampuan personal.

Hasil penelitian ini relevan dengan studi terdahulu yang dilaksanakan Suwigyo (2019) pelatihan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian milik Muhammad Rahmat dkk (2021) juga memperlihatkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil uji t pada hipotesis kedua (H_2) bisa diamati pada Tabel 15. bahwa kejelasan tujuan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), hasil uji t menunjukkan bahwa t_{tabel} sebesar 2,032 dan t_{hitung} sebesar 2,335 dengan nilai signifikan 0,026, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka H_2 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), artinya kejelasan tujuan yang terdapat pada BPKAD Kabupaten Jember telah ditetapkan secara spesifik dan terukur sehingga dengan adanya kejelasan tujuan tersebut dapat meningkatkan keberhasilan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil dari penelitian ini relevan dengan studi yang dilaksanakan oleh Zakaria (2022) yang mengemukakan bahwa kejelasan tujuan memiliki pengaruh pada implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, serta milik Rahmat dkk (2021) yang menunjukkan bahwa kejelasan tujuan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Pengaruh Dukungan Atasan terhadap Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil uji t pada hipotesis ketiga (H_3) bisa diamati pada Tabel 15. bahwa dukungan atasan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), hasil uji t memperlihatkan t_{tabel} sebesar 2,032 dan t_{hitung} sebesar 3,267 dengan nilai signifikan 0,002, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka H_3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dukungan atasan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), berarti makin tinggi tingkat dukungan yang diberikan oleh atasan pada karyawannya akan makin optimal pula implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, dan begitupun kebalikannya, jika atasan kurang memberikan dukungan terhadap pegawainya akan membuat rendahnya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Hasil dari penelitian ini relevan dengan studi yang dilaksanakan oleh Muflih (2021) yang menunjukkan dukungan berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah. Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Handayani (2022) juga menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilaksanakan oleh penulis bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kejelasan tujuan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.
3. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dukungan atasan memiliki pengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah.

Keterbatasan

1. Penyebaran kuesioner memerlukan waktu lebih lama karena terdapat banyak agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Jember.

2. Terdapat beberapa responden yang memohon supaya kuesioner ditinggalkan saja, menyebabkan peneliti tidak dapat memberi kendali terhadap jawaban responden, oleh karenanya jawaban yang responden berikan belum pasti menerangkan keadaan yang sebenarnya.

Saran

1. Sebaiknya peneliti yang akan datang hendaknya berkoordinasi dulu untuk siapa kuesioner itu ditujukan supaya dapat mengefisiensi waktu.
2. Peneliti yang akan datang harus memberi tambahan metode berupa wawancara untuk mengumpulkan data agar jawaban responden subjektif saat mengerjakan kuesioner dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Soedjatmiko, & Zainab. (2019). Pengaruh Dukungan Atasan, Pelatihan Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Di Pemerintah Kota Banjarmasin. *Dinamika Ekonomi-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2): 375-389.
- BPK RI. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2018-2022. Sidoarjo: BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dari <https://jatim.bpk.go.id/lkpd-kabupaten-jember/>
- Daft, R. L. (2008). *Organisation Theory and Design (Eight Edition)*. United Cengage Learning.
- Dahniar, Faridah., & Nur, I. (2019). Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (pada Kantor BKUD Kab. Pinrang). *Economics Bosowa Journal*, 5(003): 880-892.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service Expanded Edition Serving, not Steering*. M.E Sharpe.
- Dewi, C. I. R. S. D., Surya, L. P. L. S., & Yudha, C. K. (2020). Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak dan Kejelasan Tujuan terhadap Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2): 110-116.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia (II)*. BPFE Yogyakarta.
- Handayani, P. (2022). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, dan Dukungan Atasan terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Desa (SISKEUDES) Ditinjau dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Karmana, D., Nasution, S. M., Fudsy, M. I., & Lesmana, B. (2022). Pengaruh Penerapan SIMDA Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung). *Accounting and Management Journal*, 2(2): 130-137.
- Manasikana, A. (2019). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan dan Dukungan Atasan terhadap Implementasi Sistem Keuangan Desa (Studi Kasus pada Bagian Keuangan Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus). *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mandalasari, M., Darmawan, E., & Ichi. (2019). The Influence of Organizational Culture, Training, Peak Management Support and Clarity Of Goals On The Effectiveness Of Regional Financial Information Systems (Case Study on Subang District Work Unit (SKPD)). *JPSAM (Journal of Public Sector Accounting and Management)*, 1(1): 70-87.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Muflih, M. A. (2021). Pengaruh Faktor Keprilaku Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa). *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ningtias, A. W., & Mujilan. (2020). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Persepsi Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Madiun. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 08(02): 184-197.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- Rahmat, M., Dewi, R. S., & Supriyani, L. (2021). Prilaku Organisasi dalam Meningkatkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, 4(1): 221-226.
- Ridwan, M., Septiawan, B & Suratman, S. S. (2019). Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Perspektif Komitmen Organisasional Dan Pengetahuan Manajer. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(2): 95-103.
- Rivai, V. (2006). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. RajaGrafindo.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Safitri, Y. E. (2022). Pengaruh Dukungan Atasan, Kejelasan Tujuan, dan Pelatihan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2018). *Metodologi Penelitian*. Alfabeta.
- Shields, M. D., & Young, S. M. (1989). Behavioral Model for Implementing Cost Management System. *Article in Journal of Cost Management*. 17-27
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwigyo, D. (2019). Pengaruh Pelatihan, Kejelasan Tujuan, Dukungan Atasan terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lebak). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1): 35-49.
- Tanjung, A. H. (2008). Akuntansi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi. CV Alfabeta.
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 7(1): 637-649.
- Yanto, E., & Akfir. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan). *Indonesian Journal of Strategic Management*, 3(1): 44-59.
- Zakaria, B. (2022). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Kepulauan Sula). *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 4(0): 10-24.